

LAPORAN RESES
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi Jawa Tengah
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024
21 s.d 28 Januari 2024

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Jawa Tengah
Senin, 26 Februari 2024

Dibacakan Oleh:
H. Arifin Mustofa, S.Pd

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang Kami Hormati, Gubernur Jawa Tengah

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Kami Hormati Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah

Yang Kami Hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Jajaran Eksekutif, Wartawan, Mahasiswa, segenap tamu undangan serta hadirin yang berbahagia

Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada kesempatan ini, kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan tugas - tugas yang telah diamanahkan kepada kita.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Reses Masa Persidangan II tahun 2024 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah kami laksanakan pada tanggal 21 s.d 28 Januari 2024 berlokasi di daerah pemilihan se-Jawa Tengah.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam Reses Tahun Sidang 2024 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan agenda Reses di 10 daerah pemilihan:

1. Kota Semarang oleh Saudara H. Agung Budi Margono, S.T, M.T
2. Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang oleh Saudari Hj. Ida Nurul Farida, M.Pd
3. Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Saudara H. Setia Budi Wibowo, S.Ag, M.M

4. Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen oleh Saudara H. Hadi Santoso, S.T, M.Si
5. Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta oleh Saudara Dipl.-Ing. H. Quatly Abdulkadir Alkatiri.
6. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang oleh Saudara H. Arifin Mustofa, S.Pd.
7. Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga oleh Saudara H. Tri Mulyantoro, S.H
8. Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap oleh Saudara Jasiman, Lc
9. Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal oleh Saudara H. Sururul Fuad, Lc, M.E.I
10. Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan oleh saudara H. Riyono, S.Kel, M.Si

Hadirin Yang Kami Hormati

Adapun aspirasi, masukan, saran temuan selama kegiatan reses secara khusus di antaranya sebagai berikut :

1. Warga sangat Desa Jubang Kecamatan Bulakamba membutuhkan pembangunan jembatan Kalisoga tahun ini. Hal ini untuk memudahkan akses transportasi menuju Slati Kecamatan Larangan. Prioritas pembangunan jembatan tersebut untuk memudahkan transportasi antar dua wilayah yang bersebrangan. Kami meyakini bahwa dengan pembangunan jembatan tersebut mampu membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Lonjakan harga berasa kembali terjadi di Jawa Tengah. Harga beras C4 di pasar tradisional Kudus meroket hingga Rp.15,000 per

kilogram. Sementara mentik wangi menyentuh harga Rp.21,000 per kilogram. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Perum Bulog Kanwil Jateng menyiapkan strategi pengendalian harga dengan berencana menggelontorkan beras stabilisasi pasokan harga pasar (SPHP). Targetnya, beras SPHP akan disalurkan dua kali lipat dari rerata penyaluran SPHP tahun 2023, yakni dari 7,800 ton per-bulan menjadi 15,000 ton per-bulan. Fraksi PKS mengapresiasi langkah stabilisasi harga pangan tersebut kendati demikian kebijakan tersebut harus ada monitoring evaluasi untuk mengawasi penjualan beras SPHP di pasaran. Kami meminta Pemprov melalui Dinas terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat dalam penjualan beras SPHP supaya harga beras SPHP nantinya ikut naik karena ulah oknum tertentu.

Pengawasan tersebut Wibowo maksudkan agar SPHP tidak diborong dan ditimbun oleh oknum tak bertanggungjawab. Harga beras SPHP sendiri diketahui sebesar Rp.9,950 per-kilogram. Dengan perkiraan biaya distribusi, SPHP akan sampai ke tangan masyarakat dengan rentang harga Rp.10,200 – Rp.10,300 per-kilogram. Sementara itu Harga Eceran Tertinggi (HET) dipatok dengan harga Rp.10,900 per-kilogram. Kami berharap penyaluran pasokan beras SPHP dapat didistribusikan secara merata baik di pasar tradisional maupun ritel modern sehingga mampu mengendalikan harga beras sebelum panen raya pada April mendatang. Harapannya penyalurannya dimaksimalkan secara rata, sehingga mampu mengendalikan harga beras di pasaran sebelum panen raya April besok.

3. Fraksi PKS mendorong akselerasi pengurusan perizinan via online di Jawa Tengah. Hal ini lantaran banyaknya dampak positif atas peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan online. Dampak

positif berupa peningkatan perizinan dapat terlihat dari capaian Jawa Tengah tahun 2023 lalu. Tercatat 43.569 perizinan berhasil diterbitkan. Menariknya, sebagian besar perizinan tersebut, yakni 40,910 diterbitkan melalui layanan digital. Baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Maupun melalui Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG). Data tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan perizinan sebanyak hampir 50 persen dari tahun sebelumnya dengan total 28,511 terbitan perizinan. Selain itu, masyarakat cenderung memilih layanan publik berbasis online dengan alasan kemudahan, dan kepastian layanan. Di Jateng sendiri tren pembuatan perizinan cenderung meningkat dari tahun sebelumnya, dengan lebih dari 70 persennya diakses melalui online. Ini artinya kemudahan mampu mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan. Kemudahan akses perizinan dapat menstimulus pertumbuhan investasi daerah. Oleh karena itu, kami mendorong jejaring dan kolaborasi yang lebih kuat antar multi stakeholder, baik antarunit instansi pemerintah, akademisi sampai dengan pelaku usaha untuk menghasilkan pelayanan prima yang lebih efisien. Selain itu, terus berupaya mendorong iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan meningkatkan realisasi investasi.

4. Kementerian Kesehatan melaporkan data mengejutkan terkait kasus Tuberkulosis (TBC). Tercatat sekitar 1.060.000 kasus TBC terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ironisnya Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah kasus yang tergolong tinggi, yakni 96.917 kasus. Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa dalam periode satu tahun saja terdapat sekitar 294 persen kasus (per-tahun 2023). Dalam hal ini, Tegal menduduki presentase tertinggi temuan kasus

terbanyak baik di tingkat Jateng maupun Nasional. Hal ini menegaskan bahwa kasus TBC di Jateng perlu menjadi perhatian serius. Kami mendapatkan informasi dari Dinkes Jateng bahwa presentasinya benar-benar melebihi ekspektasi dari yang semula 90 persen, realitanya sampai 115 persen Kasus ini (TBC).

Pasalnya dalam satu tahun, diperkirakan terdapat sekitar 134.000 kematian akibat TBC. Artinya, setiap jam ada 15 kematian akibat TBC. Terlebih anak-anak penderita TBC rawan terkena tengkes atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat berat badan yang terus-menerus turun. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan anak-anak kedepannya. Kemudian hal paling penting yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan TBC adalah dengan menemukan penderita dengan gejala TBC. Bahwa penemuan kasus dapat mempercepat pengobatan pasien serta mencegah hingga memutus kemungkinan penularan. Sangat penting untuk mendeteksi orang dengan gejala TBC agar lebih cepat diobati dan memutus potensi penularannya. Fraksi PKS mengusulkan bahwa penanganan TBC di Jawa Tengah tak dapat dipasrahkan oleh satu pihak saja seperti Dinas Kesehatan. Penanggulangannya perlu dilakukan secara masif, dan terintegrasi dengan melibatkan pula akademisi, pihak Non Government Organisation (NGO) atau swasta, media, hingga masyarakat itu sendiri. Semua harus bahu membahu melibatkan para akademisi, NGO dan swasta, media, hingga masyarakat itu sendiri.

5. Masih adanya sekolah negeri yang memungut biaya sekolah adalah keluhan yang masuk dari masyarakat Grinting Brebes. Sekolah negeri tidak diperkenankan memungut biaya dari peserta didik. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 181 huruf di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan yang

berlaku tidak dibenarkan sekolah negeri memungut biaya dari peserta didik, orangtua/Walinya. Pembayaran yang diperbolehkan adalah yang bersifat sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Pembayaran untuk biaya pendidikan yang diperbolehkan adalah Bantuan pendidikan dari pihak di luar peserta didik, orangtua/wali dan juga bantuan pendidikan dari peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat sukarela dan tidak mengikat satuan Pendidikan.

Pungli umumnya terjadi karena didasarkan atas rekayasa kebutuhan pendanaan sekolah yang kurang. Beberapa kedok pungli yang biasanya terjadi antara lain pungli berkedok pungutan uang infak, uang seragam, uang gedung, uang study tour, uang ekstrakurikuler, uang buku ajar dan LKS, hingga uang wisuda. Kami menenggarai, ada tiga pihak yang biasanya menjadi pemeran pungli di sekolah, yaitu oknum pihak sekolah, kordinator kelas, dan komite sekolah. Mereka merekayasa dengan alasan pendanaan sekolah dan kebutuhan pendidikan.

6. Permasalahan pupuk sudah menjadi PR lama yang tak kunjung selesai. Pasalnya, keluhan petani akan ketersediaan dan mahalnya harga pupuk selalu menjadi keluhan dan aspirasi petani dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi di seluruh wilayah Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Keluhan tentang harga pupuk yang sulit dijangkau. Ketersediannya-pun sangat terbatas, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Memasuki awal musim tanam, Pemerintah mendorong peningkatan produksi beras, Pemerintah telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk, yang mana 1,2 ton adalah pupuk subsidi sementara 0,5 ton lainnya adalah pupuk non-subsidi. Ketersediaan pupuk di Indonesia, utamanya pupuk subsidi harus

dikawal dengan serius untuk menghindari penyalahgunaan dan permainan oleh oknum tertentu hingga mafia pupuk. Adanya indikasi mafia pupuk yang mempengaruhi ketersediaan pupuk baik subsidi maupun non-subsidi di lapangan lantaran ketersediaan pupuk begitu berbanding terbalik dengan total produksi dan ketersediaannya. Indikasi tersebut diperkuat dengan temuan kasus penyalahgunaan penyaluran pupuk subsidi di Kebumen yang merugikan negara sebesar 8,6 Miliar Rupiah pada awal Oktober tahun 2023 lalu. Tersangka menjual pupuk subsidi keluar dari wilayahnya dan mengakibatkan kelangkaan pupuk di sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen.

Pemerintah tidak hanya bertanggungjawab untuk menjamin ketersediaan stok pupuk, namun juga menjamin pupuk tersebut terdistribusi dengan baik. Distribusi pupuk baik subsidi maupun non-subsidi semestinya perlu dikawal dan dipantau dengan baik. Bila perlu, Pemerintah bisa menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk non-subsidi. Dengan begitu mafia akan sulit mempermainkan harga di pasaran. Karena masyarakat dapat turut memantau dan mengawasi, agar mafia yang terindikasi dapat segera ditindak. Masyarakat harus mengawasi penyaluran pupuk subsidi di lapangan dengan melaporkan segala tindak penyalahgunaan dan kecurangan. Hal tersebut ditujukan agar Pemerintah melalui aparat dapat segera memproses sekaligus memberikan efek jera, juga tekanan pada pelaku dan jaringan mafia lainnya.

7. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan fakta bahwa lahan pertanian di Kabupaten Demak semakin berkurang dari tahun ke tahun. Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Demak mengalami penurunan sekitar 13,60 persen atau 20.006 unit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selain itu Rumah Tangga

Usaha Pertanian (RTUP) juga mengalami penurunan sebanyak 4,4 persen atau 125.659 rumah tangga. Hal tersebut disebabkan lantaran masifnya pengurangan lahan akibat pembangunan jalan tol, pabrik, dan perumahan. Tak sekedar pengurangan lahan, bahwa pembangunan tersebut nyatanya juga menimbulkan penurunan permukaan lahan hingga timbulan genangan rob di area yang tak ditanggul. Hal ini merupakan ironi. Bukan tanpa alasan, 10 Tahun lalu, Kabupaten Demak diandalkan sebagai daerah penyangga pangan nomor 2 di Jawa Tengah sekarang menurut data BPS menurun ke peringkat 4. Sekarang, petani dan pelaku usaha pertanian terpaksa menyerah dengan keadaan. Lahan yang tergenang rob banyak ditinggalkan begitu saja. Kami memandang perlu adanya sinergisitas antara Dinas Pertanian Provinsi dan Daerah hingga Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian (BPP) untuk melakukan pendampingan terkait revitalisasi lahan pertanian yang ditinggalkan. Oleh karenanya solusi penanganan masalah pertanian di Kabupaten Demak ini sejatinya perlu diselesaikan secara komprehensif atau menyeluruh.

Demikianlah beberapa hal yang menjadi masukan, temuan selama masa Reses anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami harap Saudara Gubernur bisa memperhatikan serta menindaklanjutinya. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

ttd

H. AGUNG BUDI MARGONO, S.T, M.T
KETUA

ttd

H. RIYONO, S.Kel, M.Si
SEKRETARIS

